

ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Banyak cara yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya dengan melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan surat teguran dan surat paksa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh, baik secara parsial maupun secara simultan antara adanya penerbitan surat teguran dan penerbitan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Jakarta Tahun 2016-2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data penerbitan surat teguran, penerbitan surat tagihan dan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Matraman Jakarta tahun 2016-2018. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian bahwa surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pelayanan Pratama Matraman Jakarta terhadap wajib pajak yang terdaftar selama periode tahun 2016-2018 secara simultan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Secara parsial, baik surat teguran maupun surat tagihan yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pelayanan Pratama Matraman Jakarta juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata Kunci: Pencairan Tunggakan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa.

ABSTRACT

Tax is a state income that is potential enough to support the success of national development. Revenue from the tax sector is the largest source of state revenue. Many ways are carried out by the Directorate General of Taxes to increase state revenue from the tax sector. One of them is by collecting Value Added Tax (VAT) with letters of reprimand and forced letters.

The purpose of this study was to determine the effect, both partially and simultaneously between the issuance of letters of reprimand and the issuance of forced letters against the disbursement of tax mites at the Jakarta Pratama Tax Office 2016-2018 at the Jakarta Pratama Tax Office. The method used in this research is quantitative descriptive research method. The type of data used in this study is secondary data consisting of data issuing warning letters, issuing bills and disbursing tax arrears at KPP Pratama Matraman Jakarta 2016-2018. The classic assumption test used in this study consisted of a data normality test, a multicollinearity test, an autocorrelation test and a heteroscedasticity test. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis.

The results showed that based on the results of the study that warning letters and forced letters issued by the Jakarta Matraman Prataman Service Tax Office on registered taxpayers during the 2016-2018 period simultaneously had no significant effect on disbursing tax arrears. Partially, both the reprimand letter and bill issued by the Jakarta Matraman Primary Service Tax Office also had no significant effect on the disbursement of tax arrears.

Keywords: Disbursement of Tax Arrears, Letter of Rebuke, and Forced Letter.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA